

**IMPLEMENTASI RENCANA PENGELOLAAN SEKTOR PERIKANAN**  
(Studi Direktorat Nasional Perikanan dan Budidaya/ DNPA Kementerian Pertanian Dan  
Perikanan MAP Dili Timor-Lesté)

Maria De A. Dias X

Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang

Email: [ximenes31@yahoo.com](mailto:ximenes31@yahoo.com)./ [maria31xiemenes@gmail.com](mailto:maria31xiemenes@gmail.com)

*Abstract: The implementation at DNPA domain is organized by the stakeholders of the ministry. Decision is made based on consultation with stakeholders in the domain of ministry or ministerial line at ministry and junior minister offices. Some actors play important role in the implementation of planning and management policy for fishery sector. The actors may not only include governmental institutions but also private and community. Communication is a very important matter within institution and organization. Resources represent an important factor in the implementation of an activity or task because without resource, the assignment is hardly executed. Bureaucracy is a structure comprising of routine operational assignments that must be accomplished through specialization, regulation and quite formal stipulation.*

*Keywords: Implementation Fisheries Sector the management plan*

Abstrak :Implementasi di direktorat DNPA adalah para *stakeholder* yang ada di kementerian keputusan diambil berdasarkan konsultasi di Kementerian dan Menteri Muda dengan para *stakeholder* di lingkungan kementerian atau jajaran kementerian, peran aktor dalam implementasi rencana pengelolaan sektor perikanan sangat diperlukan, tidak hanya peran dari instansi pemerintah tapi juga swasta dan masyarakat. Komunikasi didalam suatu institusi maupun organisasi sangat penting. Sumberdaya merupakan salah satu faktor terpenting didalam pelaksanaan suatu kegiatan, Birokrasi merupakan sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal.

Kata Kunci : Implementasi rencana pengelolaan sektor perikanan

## **PENDAHULUAN**

Timor-Lesté, salah satu negara demokratis termuda di dunia, telah membuat langkah besar dalam dekade kemerdekaan. Namun banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi, yaitu pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur, pertanian, perikanan, kesehatan dan pendidikan penting bagi Negara Timor-Lesté, karena kekayaan sumber daya alam perlu dikelola demi kesejahteraan masyarakat, serta untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Dalam kondisi ketersediaan sumber daya alam yang digunakan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadi penting dan

merupakan prioritas perhatian bagi setiap negara Sebagai negara baru merdeka yang memiliki luas wilayah laut atau panjang pantai 706 km<sup>2</sup> & luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 75.000 km<sup>2</sup> keseluruhan laut Timor-Lesté, Kementerian Pertanian dan Perikanan (Ministry Agriculture and Fisheries/MAF) dan Kementerian Muda Perikanan (*and Secretary State of Fisheries*, 2007), Keputusan Menteri (*Diploma Ministerial*) No 01/03/GM/I/2005, Pengaturan Zona Perikanan (*Definição de Zona de Pesca*) Sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan (*primer mover*) dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam (*resource based economy*).

Peluang pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan nasional sampai wilayah zona ekonomi Eksklusif (ZEE) masih terbuka. Jika tidak kita manfaatkan, maka ada kewajiban internasional untuk mengizinkan kapal asing memanfaatkannya dengan resiko berkembangnya (*illegal fishing*), Undang-Undang (*Lei*) No. 12/2004/29 de Dezembro tentang pelanggaran yang berkaitan dengan penangkapan/perikanan (*relacionadas com o* pasal III pelanggaran penangkapan ilegal yang dapat mengancam keutuhan wilayah nasional. Sementara itu, pemanfaatan wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) memerlukan ukuran armada yang memadai.

Menurut Dye (1981) dan Anderson (1979), terdapat tiga manfaat penting dalam studi kebijakan publik. Manfaat pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan yaitu melalui studi ini ditemukan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. Manfaat kedua yaitu membantu para partisipasi dalam memecahkan masalah, yaitu dengan mempelajari kebijakan publik praktis akan memiliki dasar teoritis mengenai bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik.

Sumberdaya perikanan nasional sampai saat ini belum memberikan manfaat dan kontribusi yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dan sebagai gambaran, pada subsektor perikanan tangkap, walaupun tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan diperkirakan telah lebih dari 45% dari potensi lestarnya, tetapi sebagian besar (sekitar 95% ) struktur armada penangkapan masih tergolong dalam skala kecil (dibawah 30 GT) yang daya jelajahnya hanya terbatas di pantai dengan tingkat produktivitas dan efisiensi usaha yang relatif rendah.

Bidang kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi penting karena: (a) kapasitas suplai sangat besar, sementara permintaan terus meningkat; (b) pada umumnya *ouput* dapat diekspor, sedangkan *input* berasal dari sumber daya lokal; (c) dapat membangkitkan industri hulu hilir yang besar, sehingga menyerap tenaga kerja cukup banyak; (d) umumnya berlangsung di daerah dan (e) industri perikanan bioteknologi dan pariwisata bahari bersifat dapat diperbaharui (*renewable resources*), sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang di hadapi, maka diperlukan inovasi dan strategi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, mengingat Timor-Lesté sebagai negara pulau memiliki kawasan kelautan dalam pembangunan nasional. Pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan memerlukan keterpaduan pembangunan pada masing-masing sektor.

Pengelolaan wilayah pesisir memang menghadapi suatu keadaan yang rumit karena banyak sekali aktor yang berkepentingan di wilayah pesisir, sebagaimana dikemukakan oleh Hovik & Stokke ( 2007:940-941)” *coastal zone management is described as a complex management situation, with numerous actors, with different interests, world views, values and goals. In addition, there are asymmetric division of power and dependencies between the different actors*”. Banyak faktor yang telah menyebabkan pembangunan nasional pada masa lalu belum seperti yang kita harapkan, salah satu faktor yang terpenting adalah bahwa proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pembangunan perikanan sangat sentralistik (*top down*, yang diterapkan telah menimbulkan ketidak-teraturan dalam pengelolaan sumberdaya laut sehingga sangat rawan konflik antar nelayan.

Pemerintah tentu memegang peranan penting dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan perikanan ini, selain pemerintah pusat, masyarakat serta *stakeholder* lainnya yang berkepentingan di sektor perikanan tentunya. Mereka harus siap menghadapi tantangan dalam mengelola sektor perikanan yang sangat potensial, supaya tidak ada lagi terjadi kebijakan yang merugikan masyarakat nelayan.

Long & Long (1992) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perumusan kebijakan publik yang partisipatif, interaksi aktor harus berlangsung secara setara, intensif dan *interface*. Model inilah yang oleh kedua penulis disebut sebagai model orientasi aktor. Sementara de Zeeuw (2001), seorang psikolog menyimpulkan bahwa perumus kebijakan publik seharusnya memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat anggota kolektivitas secara keseluruhan sehingga kebijakan yang ditentukan tidak memihak dan dapat diakses oleh seluruh aktor yang terlibat dalam kolektivitas tersebut. Harmon (1969) meneliti tentang kepentingan publik yang merupakan konsekuensi yang muncul dalam proses formulasi kebijakan publik yang ditentukan oleh orientasi dan kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya, baik aktor pemerintah (*administrator*) maupun aktor masyarakat yang terdiferensiasi berdasar kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam komunitas masyarakat. Almond & Verba (1985) meneliti perbandingan orientasi aktor yang disebut sebagai budaya politik di berbagai negara menyimpulkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara penampilan rezim politik yang tergambar dalam model-model dan sifat kebijakan yang dibuatnya dengan tipologi budaya politik masyarakatnya. (Sinclair (2002 dalam penelitiannya di Brazilia menekankan pentingnya peran dan keterlibatan

masyarakat dalam segala proses pembangunan, disimpulkan bahwa, konsultasi masyarakat merupakan bagian integral yang harus dilakukan dalam setiap tahapan pembangunan, baik proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelestarian keberlangsungan hasil pembangunan (*Sustainable development*). Choy (2004) dalam penelitiannya di Waduk Bakun, Serawak, Malaysia menyimpulkan bahwa pembangunan Waduk serbaguna seharusnya mampu meningkatkan sosial ekonomi dan melestarikan budaya asli masyarakat di sekitar proyek pembangunan infrastruktur (Waduk), dan bukan sebaliknya masyarakat tercabut dari akar historis sosial ekonomi dan ekosistemnya akibat pembangunan yang dilaksanakan secara otoriter oleh pemerintah dengan alasan kepentingan yang lebih makro.

Kebijakan publik merupakan suatu aturan dibuat pemerintah merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu yang ada dan berkembang dimasyarakat kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu. Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Easton (1969) Pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Menurut A. James Anderson. dalam Subarsono (2005: 2), kebijakan publik merupakan “kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah”. Senada dengan Laswell dan Kaplan, Easton David dalam Subarsono (2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat”, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Menurut Daniel A. Sabartier dan Paul A. Sabartier dalam (Wahab, 2008:65), implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian dan kegiatan -kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan Van Horn dan Van Meter dalam (Widodo, 2009:86) merumuskan bahwa proses implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Begitu banyak persoalan implementasi kebijakan, yang terkadang persoalan tersebut belum terpikirkan atau terkonsep sama sekali dalam sebuah kebijakan, hal ini tentu membutuhkan pendekatan-pendekatan yang diramalkan mampu mengatasi persoalan implementasi di lapangan. Persoalan inilah yang memicu sejumlah ahli untuk berlomba-lomba melahir beragam model implementasi kebijakan, tentu berdasarkan persoalan yang di hadapi, pemahaman dan pengalaman mereka masing-masing. Model tersebut dikenal sebagai berikut: (1) Model Van Meter dan Van Horn; (2) Model Mazmanian dan Sabatier; (3) Model Hogwood dan Gunn;

(4) Model Goggin, Bowman, dan Lester; (5) Model Grindle; (6) Model Elmore, dkk.; (7) Model Edward III; (8) Model Nakamura & Smallwood; dan (9) Model Jaringan.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam saling terkait satu sama lain. Terdapat banyak definisi tentang perencanaan yang terlihat beda pada beberapa literatur perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang, perbedaan fokus penelitian, dan perbedaan luasnya bidang yang mencakup dalam perencanaan itu sendiri. Setiap orang yang menyusun rencana berarti menetapkan sejumlah langkah ke depan dalam pikirannya. Yang harus menuju ke arah suatu hasil tertentu. Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari jumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (Kartasamita,1997:48)

Selanjutnya Conyers dan Hills (1990:30) memberikan definisi perencanaan sebagai " *continuous process which involves decisions, or choices, about alternative ways of using available resources, with the aim of achieving particular goals at same time in the future*" (suatu proses berkesinambungan yang melibatkan keputusan atau pilihan tentang cara-cara alternatif menggunakan sumberdaya yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang) perencanaan yang dimaksud dalam dua pengertian tersebut terkait dengan perencanaan ekonomi ataupun perencanaan pembangunan yang berfokus pada bagaimana mengolokasikan sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien

Pengelolaan sektor perikanan Timor-Lesté harus dilakukan secara berkelanjutan bukan berfokus kepada kuantitas tangkapan, agar tidak terjadi kondisi kekurangan ikan di masa mendatang. Selama ini, pengelolaan dan praktik perikanan di Timor-Lesté masih terfokus pada jumlah tangkapan, belum memperhatikan keseimbangan ekosistem," kata Direktur Program Kelautan dan Perikanan *World Wildlife Foundation* (WWF) dampak dari praktik perikanan yang masih fokus pada jumlah tangkapan akan negatif yaitu adanya kerusakan terumbu karang dan ekosistem dasar laut serta terjadinya *overfishing* (penangkapan berlebihan). Dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan perlu diperhatikan daya dukung dan kemampuan asimilasi wilayah laut, pesisir dan daratan dalam hubungan ekologis, ekonomis, dan sosial. Kesinambungan ketersediaan sumber daya ini merupakan kunci dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah sejenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu fenomena tanpa mencari hubungan antara pengaruh dua *variabel* atau lebih. Penelitian

adalah suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian yang berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi dan eksklusif (dimasukkan dan dikeluarkan) suatu informasi yang diperoleh dilapangan dan membatasi studi. Implementasi kebijakan perencanaan pengelolaan sektor perikanan di Timor-Lesté yang dapat dilihat melalui: Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan perencanaan, tahap-tahap implementasi kebijakan, Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan sektor perikanan. maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamat), dokumentasi dan gabungan ketiganya.

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, derajat kepercayaan disebut dengan keabsahan data, untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang di dasarkan atas jumlah kriteria tertentu, ada empat kriteria di anjurkan dalam teknik pemeriksaan keabsahan yaitu: Derajat kepercayaan (*Credibility*, Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*Dependability*, Kepastian *Confirmability*). Sedangkan analisa data menggunakan model analisa interaktif dari Miles dan Huberman dan Saldana (2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Distrik (Kabupaten) Dili merupakan ibukota negara Timor-Lesté yang secara Administratif terbagi 6 sub distrik (Kecamatan), yaitu sub distrik Atauro, Dom Aleixo, Cristo Rei, Nain Feto, Metinaro, Vera Cruz dan 48 *suco* (Desa) dan 243 *aldeia* (Dusun). Secara geografis, letak Distrik Dili bervariasi atau beraneka ragam antara tanah datar disebelah utara dan berbukitan dan disebelah selatan. Selain terdapat pesisir dan pantainya, Distrik ini menjangkau sampai daerah bergunung-gunung yang tidak datar

Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perencanaan pengelolaan sektor perikanan yaitu Koordinasi di jajaran direktorat nasional perikanan sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan sektor perikanan karena keterlibatan dari setiap departemen saling mendukung satu sama lain dalam pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan strategi pembangunan nasional budidaya perlu adanya keterlibatan *stakeholder* atau pemangku kepentingan untuk mengkoordinir dari tingkat pusat sampai pada tingkat lokal. Pelaksanaan strategi yang terkoordinir untuk bekerja sama para *stakeholder* dari pusat sampai ke lokal untuk melaksanakan program kedepan diperlukan strategi pelaksanaan sektor perikanan yang berkelanjutan untuk itu perlu melihat potensi-potensi yang mendukung perikanan. Harmon (1969) meneliti tentang kepentingan publik yang merupakan konsekuensi yang muncul dalam proses formulasi kebijakan publik yang ditentukan oleh orientasi dan kepentingan aktor yang terlibat didalamnya, baik aktor pemerintah (administrador) maupun aktor masyarakat yang terdeferensia berdasarkan kelompok-kelompok kepentingan yang ada didalam komunitas masyarakat. Peran aktor dalam implementasi rencana pengelolaan

sektor perikanan sangat diperlukan, tidak hanya peran dari instansi pemerintah tapi juga swasta dan masyarakat.

Komunikasi merupakan satu variabel yang penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2008:150) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Sumber daya syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*". Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*". Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: "*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*". Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: "*Material resources- equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*". Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: "*Financial resources- cash on hand, debt financing, owner`s investment, sale reveue, etc*". Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: "*Data resources-historical, projective, cost, revenue, man power data etc*". Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Tahap-tahap implementasi kepentingan publik pada dasarnya merupakan perpaduan antara orientasi aktor yang berinteraksi. Sehingga proses dan kualitas interaksi orientasi aktor yang intensif dan *interface* dalam tahapan *Problem defining* dan *agenda setting* sangat mempengaruhi kualitas kepentingan publik yang dijadikan bahan baku dalam proses perumusan kebijakan publik yang di hasilkan. Proses kebijakan publik yang partisipatif, dipersyaratkan untuk mempersiapkan perumusan kebijakan publik melalui prakondisi dengan jalan

memahami eksistensi orientasi masing-masing aktor yang berinteraksi agar setara dan mampu memahami kepentingan masing-masing pihak

Faktor Pendukung Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah dipilih dan diterapkan menjadi sebuah kenyataan, atau penerapan perancangan kedalam sebuah praktik. Namun, tidak semua program yang diterapkan berjalan dengan lancar, pasti akan ada hambatan dalam penerapan tersebut. Hal ini menurut Dunclair dalam Wahab (2008:61) dinamakan sebagai *implementatiom gap*, sebagai suatu keadaan dimana dalam suatu kebijakan akan adanya kemungkinan perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang dicapai. Sumberdaya alam (*Natural resources*) Sumberdaya alam di Timor-Lesté khususnya sumberdaya perikanan sangat potensial sehingga perlu adanya pengembangan dan pengelolaan secara terpadu serta berkelanjutan, juga tenaga-tenaga profesional disektor perikanan mendukung pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam khususnya bidang perikanan. Dukungan (MAP/DNPA), Direktora Nasional Perikanan dan Budidaya atau Kementerian Pertanian dan Perikanan (DNPA/MAP) sangat mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan sektor perikanan dalam memberikan dukungan (*suport*) kepada nelayan petani ikan yaitu pembagian kapal dan perlengkapan kepada nelayan di pesisir dan memberikan benih ikan kepada petani ikan untuk di budidayakan serta dari partner atau mitra kerja juga membantu dalam pengembangan masyarakat dan petani dalam pelatihan-pelatihan sektor perikanan.

Faktor penghambat, dalam implementasi rencana pengelolaan sektor perikanan selain terdapat faktor pendukung terdapat juga faktor penghambat yang diidentifikasi dalam hasil penelitian, Sumber daya manusia (Human Resources) Sumberdaya manusia (Human Resources) sangat penting didalam pelaksanaan pengelolaan sektor perikanan untuk itu perlu pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang ada sehingga kedepan, sektor perikanan mendukung akan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan, Fasilitas yang ada di Direktora Nasional Perikanan dan Budidaya (DNPA) ini masih sangat minim untuk itu perlu adanya fasilitas yang memadai atau cukup sehingga bisa mendukung pelaksanaan kegiatan sehari-hari baik dikantor maupun untuk kegiatan di lapangan. Pelaksanaan pengelolaan sektor perikanan tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh perangkat fasilitas yang memadai. Infrastruktur atau fasilitas merupakan salah satu faktor penghambat untuk pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan sektor perikanan pembangunan infrastruktur dan fasilitasnya merupakan salah satu aspek penting didalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan maupun organisasi untuk itu perlu adanya dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan sektor perikanan, Pengelolaan keuangan (negara/daerah) merupakan satu faktor untuk mengetahui secara nyata kemampuan *self supporting* pemerintah/daerah dalam mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya. Dengan asumsi faktor anggaran atau keuangan merupakan yang esensial dalam mengatur tingkat kemampuan

pemerintah/daerah dalam melaksanakan otonominya, hal ini berarti penyelenggaraan urusan pemerintah membutuhkan dana dalam pelaksanaannya (Kaho;1977) Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam kebijakan pengelolaan keuangan antara alin: Pembiayaan dalam, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan; Sumber-sumber pendapatan negara/daerah; Peningkatan pengelolaan keuangan negara/ daerah. Kehidupan para nelayan dipesisir dan petani ikan, kita ketahui bersama bahwa nelayan mengantungkan kehidupan atau mata pencaharian dengan sumberdaya perikanan. Kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya perlu pengembanagn dan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan salah satu kecenderungan baru dalam paradigma pembangunan di Timor-Lesté, kurangnya perhatian dari pada *stakeholder* bidang pengelolaan sektor perikanan yang maksimal, sehingga masyarakat pesisir di kenal memiliki karakteristik yang cukup unit dan memiliki keragaman potensi sumberdaya alam baik hayati maupun nonhayati yang sangat tinggi. Potensi sumberdaya yang ada dapat di manfaatkan oleh penduduk yang tinggal di wilayah tersebut untuk mencapai kesejahteraan baik sektor perikanan maupun diluar sektor perikanan. Kondisi kemiskinan ada di kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Pengelolaan berbasis masyarakat atau disebut *Community based management (CBM)* menurut (Nikijuluw, 2002), merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengetahuan masyarakat tersebut juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaan (*relegion*). Mubyarto, dkk. (1983), memberikan definisi strategis yang berputar pada manusia sebagai: “ suatu strategis untuk mencapai tujuan pembangunan, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat didaerah tersebut.” Pengimplementasi Kebijakan Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat di ukur dengan meliha tingkat kepatuhan (baik tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan, atau kepatuhan implementor terhadap peraturan) dalam pengimplementasian sebuah program. Kepatuhan tersebut mengacu pada perilaku implementor itu sendiri sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila diimplementasikan, dan mematuhi aturan-aturan yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut terdapat indikator dalam kepatuhan : Perilaku Implementator; Pemahaman Implementor terhadap kebijakan.

Implementasi bahkan jauh lebih penting dari perbuatan kebijakan-kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpang dalam arsip kalau tak diimplementasikan. Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa terwujud hasilnya. Implementasi bukan proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit. Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan

maupun sasaran sering terjadi selama implementasi sering terjadi beragam interpretasi atau tujuan target maupun strategisnya, implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional.

## **KESIMPULAN**

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah, Implementasi kebijakan rencana pengelolaan sektor perikanan DNPA Timor-Lesté dapat dilihat melalui : Aktor aktor yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yaitu oleh stakeholder di kemeterian, Menteri sampai pada Direktorat Nasional untuk chefe departament hanya melaksanakan rencana dan administrasi sedang para staf sebagian kecil terlibat didalam pelaksanaan di lapangan.

Peran aktor menkoordinir sumberdaya manusia di bidang perikanan khususnya di DNPA agar dapat kontribusi secara maksimal guna pencapaian tujuan nasional di sektor perikanan bukan hanya stakeholder saja tetapi masyarakat dan ornaganisi yang perannya juga sangat penting. Komunikasi diantara para staf dan pimpinan di jajaran Direktorat Nasional Perikanan dan Budidaya itu sangat penting karena dengan adanya komunikasi yang baik akan mempermudah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sumberdaya Sumberdaya merupakan hal yang sangat penting di dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program karena sumberdaya manusia adalah faktor terpenting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Struktur birokrasi, Birokrasi yang selama ini ada di DNPA kita ketahui bersama bahwa tidak berjalan sesuai dengan harap para staf dan semua elemen-elemen yang ada, untuk itu kedepan perlu perbaikan struktur birokrasi yang ada sehingga keefektifan dan keefisiensi kerja serta tidak menghalangi aktifitas-aktifas di jajaran Direktorat Nasional Perikanan dan Budidaya (DNPA). Disposisi Di Direktorat Nasional Perikanan dan Budidaya (DNPA) pimpinan yang ada selalu memberikan arahan atau petunjuk dan perintah kepada staf di lingkungan atau jajaran direktorat dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakan tepat pada waktunya. Tahap-tahap implementasi kebijakan.

Tahap Kebijakan secara politik ditentukan oleh kementerian dan menteri muda Direktor jenderal dan Direktor Nasional hanya melaksanakan ke aspek teknis dan Direktor Nasional sebagai pelaksana teknis operasional di lapangan. Setiap Nasional Direktorat wajib menyampaikan usulan-usulan yang merupakan bahan bagi penyusunan rencana pengelolaan sektor perikanan. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan rencana dan pengelolaan sektor perikanan di DNPA Timor-Lesté.

Faktor pendukung Sumberdaya alam (*Natural resources*). Sumber daya alam di Timor-Lesté khususnya sumberdaya perikanan sangat potensial sehingga perlu adanya pengembangan dan pengelolaan secara terpadu serta berkelanjutan, juga tenaga-tenaga profesional disektor perikanan mendukung pelaksana pengelolaan sumberdaya alam khususnya bidang perikanan. Dukungan dari

Kementerian Pertanian dan Perikanan atau Direktorat Nasional Perikanan dan Budidaya (MAP/DNPA) Kementerian Pertanian dan Perikanan atau Direktorat Nasional Perikanan dan Budidaya sangat mendukung dalam pelaksana pengelolaan sektor perikanan dalam memberikan suport kepada masyarakat nelayan dan petani ikan serta pelatihan-pelatihan bidang perikanan.

Faktor Penghambat. Sumberdaya manusia (Human Resources), sangat penting didalam pelaksana pengelolaan sektor perikanan untuk itu perlu pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang ada sehingga kedepan, mendukung akan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan. Fasilitas, yang ada di direktorat Nasional Perikanan dan Budidaya (DNPA) ini masih sangat minim untuk itu perlu adanya fasilitas yang memadai atau cukup sehingga bisa mendukung pelaksanaan kegiatan sehari-hari baik dikantor maupun untuk kegiatan di lapangan. Anggaran merupakan kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan sektor perikanan khususnya di direktorat Nasional perikanan dan budidaya DNPA). Masyarakat nelayan dan petani ikan, kehidupan para masyarakat nelayan dan petani ikan di pesisir, kita ketahui bersama bahwa nelayan bergantungkan kehidupan atau mata pencaharian dengan sumberdaya perikanan untuk itu perlu pengembangan dan pengelolaan sektor perikanan sehingga kedepannya bermanfaat bagi nelayan demi kesejahteraan. Kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat nelayan akan lingkungan pesisir belum begitu sadar akan pemanfaatan akan lingkungan habitat disekitarnya, karena masyarakat harus diperdayakan dulu melalui sosialisasi, dan pendampingan pelatihan. Implementasian rencana merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan struktur implementasi

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji Samekto. Pembangunan Berkelanjutan: Latar Belakang dan Prinsip-Prinsipnya. Modul 2 Pembelajaran Magister Ilmu Lingkungan UNDIP Semarang. Tahun 2014, halaman 33-65.
- Agustino Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Penerbit CV. Alfabeta Bandung
- ....., . 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amaral do Xavier Joao, 2010 *Current Fisheries and Aquaculture Policies Relevant to the Regional Fisheries Livelihood Project (RFLP) in Timor-Leste . Policy Paper*
- Anggraini, Eva. 2006. Mempertegas Kembali Desentralisasi Perikanan. Artikel. Harian Sinar Harapan. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0405/31/opi01>
- Antun Mardiyanta, Analisis Proses Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Belo correia Joaquin, 2010 Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Pelangan Air Bersih Dikota dili, Thesis

- Arajati Swarna Padmarani Arum, 2011. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Kabupaten Lombok Barat. Tesis Artikel, *Agriekonomika* Volume 2 Nomor 2 Oktober 2013 Harapan. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0405/31/opi01>.
- Budi Prasetyo, 2010. Orientasi Aktor dalam Perumusan kebijakan Publik. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Volume 21, Nomor 2:115-130 Daerah. Penerbit Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia
- Dahuri, Rokhmin. dkk. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara terpadu
- Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Direktorat Kelautan dan Perikanan. Strategis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
- Dilisti, S.P, 2011 Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian lingkungan Wilayah Pesisir. *Jurnal lingkungan Hidup Bumi Lestari Bebas Polusi, Daerah Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif (Studi di Kabupaten ProbolinggoProvinsi Jawa Timur*.
- Dunn N William.1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. UGM Gadjah Mada University Press Edoardus Ernest Maturbongs. [ematurbongs.blogspot.com/2010/06/model-formulasi-kebijakan.html](http://ematurbongs.blogspot.com/2010/06/model-formulasi-kebijakan.html)
- Hamdi, Muchlis.2014. Kebijakan Publik. Proses Analisis, dan Partisipasi. Penerbit Ghalia Indonesia
- I Gusti Nyman Yudiana. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Alam( Kajian Pengembangan Model Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Upaya Pemeeliharaan Kualitas Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat di kabupaten Banjar). Disertasi
- Inneke Meilia Fadlina. 2013. Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Kota Batu (Kajian Tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu) Tesis
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Kismartini, 2012. Implementasi Kebijakan Penegelolaan Wilayah Pesisir dalam Prespektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang. Disertasi
- Kuncoro Mudrajad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategis, dan Peluang). Penerbit Erlangga Jakarta
- Kusumastanto Tridoyo H. Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan Perhubungan Laut dalam Abad XXI. *Jurnal*
- Latuconsina, M.J. 2007. Desentralisasi Kelautan di Maluku. ([http://www.hotlinkfiles.com/files/931488\\_ytough/Opini\\_Desentralisasi.doc](http://www.hotlinkfiles.com/files/931488_ytough/Opini_Desentralisasi.doc))2012.
- Lester, James P dan Steward, Josep Jr.2000. *Public Policy:An Evolutionari Approach*. Belmont:Wadsworth.
- Marques Santos Dos Horácio,2009. Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lautem Timor-Leste Pasca Kemerdekaan. Thesis

## REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 5, No. 2, 2015

---

- Mas Achmad Santosa. Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Dalam sistem dan Praktek Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan*. Tahun III, 1996, halaman 1 – 21.
- Miles. M.B., Huberman A.M., Saldana. J. 2014. Arizona State University Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3.
- Ministry of Agriculture and Fisheries Secretariat of Sate for Fisheries, *Aquaculture Development Strategy Plan for Timor-Leste (2012-2030)*. National Directorate of Fisheries and Aquaculture Fisheries and Aquaculture (NDFA)
- Moch. Salim, dinamika kebijakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang pada Masa Reformasi dan Otonomi Daerah tahun 1998 – 2008
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- ....., Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Bandung: PT. Remaja Rosda
- Muhammad Sahri. 2011. *Kebijakan Pembangunan Perikanan & Kelautan: Pendekatan Sistem*. Penerbit: Universitas Brawijaya Press (UB Press)
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Putra, Fadilah. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik Dalam Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Randall B. Ripley & Grace A. Franklin. *Policy implementation and Bureaucracy*
- Rusli Budiman H. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Diterbitkan oleh Hakim Publishing Perum. Kota Mas Asri No. 2 Cimahi Bandung Jawa Barat
- Santoso Pandji. 2012. *Aministrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama
- Sri Hayati. dkk. *Kajian Desentralisasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Daerah*,
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta Bandung
- Sulistya Ekawati. dkk. 2011. *Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, Policy Making Process of Authorities Among Levels of Government in The Protected Forest Management and Its Implementation in The Regency Level*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 8 No. 2, Agustus 2011
- Sulitia Purnama. 2009. *Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan di Kabupaten Madiun. (Studi Terhadap Komoditi Porang Sebagai Komoditi Unggulan)* Tesis Terpadu. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Susen, DR. 2007. *Menuju Perikanan Berkelanjutan*. Pustaka Cidesindo. Jakarta  
The Dorsey Press. Chicago, Illinois, 1986, hlm. 11

## REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 5, No. 2, 2015

---

Timor-Leste *Center on Globalization and Sustainable...cgsd. columbia.edu/where-we-work/timor-lest*/Terjemahkan Timor-Leste, one of the world's youngest democracies, has made great strides in its ... *Talking Nutrition at the Ministry of Agriculture and Fisheries* in Timor-Leste

Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta:Sinar Grafika.

....., 2011. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. UPT Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik).

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik: *Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Posted by Almin Jawad Moerteza, Komunikasi itu Penting